



Sejarah Perjalanan PPP Pasca Orde Baru: Dinamika Politik dalam Mengatasi Konflik Internal Partai

Kahfi Ananda Giatama[✉] dan Ibnu Sodiq

Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima Agustus 2015
Disetujui September 2015
Dipublikasikan Oktober 2015

Keywords:

*politics, politics party,
existence, conflict.*

Abstrak

Partai Persatuan Pembangunan merupakan salah satu partai bentukan Orde Baru disamping Golongan Karya (Golkar) dan PDI. Partai Persatuan Pembangunan ini dibentuk karena peraturan Presiden Soeharto tentang penyederhanaan partai berdasarkan tiga ideologi besar yaitu Golkar, Agama dan Nasionalisme. Partai Persatuan Pembangunan merupakan hasil fusi dari empat partai Islam kecil yaitu Nahdlatul Ulama, Partai Syarekat Islam Indonesia, Partai Muslimin Indonesia dan Perti. Dalam perkembangannya, PPP setelah rezim Orde Baru tumbang karena terdapat ledakan partisipasi politik yang disalurkan melalui pembentukan partai baru. Akibat dari fenomena itu PPP sebagai partai Islam semakin bertambah saingan dalam Pemilu 1999 yang multipartai. Setelah pemilu tersebut, PPP kemudian dirundung oleh konflik internal perihal jadwal pelaksanaan Muktamar V yang dibalut konflik antar elit partai. Strategi khusus PPP dalam Pemilu 1999 adalah perubahan asas dan lambang partai menjadi Islam dan Kabah, serta penunjukkan Hamzah Haz sebagai ketua umum. Konflik internal dengan PBR diakibatkan pelaksanaan Muktamar V yang molor dan perebutan kekuasaan antara Hamzah Haz dan KH Zainuddin MZ.

Abstract

Partai Persatuan Pembangunan is a party formed by New Order beside Golongan Karya (Golkar) and Partai Demokrasi Indonesia. Partai Persatuan Pembangunan was formed because Presiden Soeharto about simplication of party based on three major ideologies that Golkar, Religion and Nasionalism. Partai Persatuan Pembangunan is the result of the fusion of four smaller Islamic parties like Nahdlatul Ulama, Partai Syarekat Islam Indonesia, Partai Muslimin Indonesia and Perti. In the expansion Partai Persatuan Pembangunan, after the fall of the New Order regime there is an explosion of political participation channelled through the establishment new party. As a result of this phenomenon PPP as a growing rival Islamic party in the 1999 elections multiparty. After the elections, PPP then beset by internal conflicts concerning the schedule Muktamar V is wrapped conflict among the elite party. a specific strategy of PPP in the 1999 elections is the change in principle and party emblem to Islam and the Ka'bah, and Hamzah Haz appointment as chairman. Internal conflicts with PBR due to implementations of the Muktamar V that is late and the power struggle between Hamzah Haz and Zainuddin MZ.

© 2015 Universitas Negeri Semarang

[✉] Alamat korespondensi:

Gedung C5, Lantai 1 FIS Unnes
Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229
E-mail: sejarahunnes@gmail.com

PENDAHULUAN

Sejarah politik merupakan salah satu cabang disiplin yang memfokuskan diri mengkaji tentang peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan partai dan pemerintahan. Partai menurut Maurice Duverger adalah komite-komite yang menyiapkan pemilihan umum dalam monarki konstitusional; dan organisasi-organisasi sosial yang membentuk suatu opini publik di suatu negara yang bersangkutan, umumnya di negara yang menganut paham demokrasi. Pada dasarnya partai politik adalah alat bantu untuk memperoleh kekuasaan dan untuk memerintah. Kadang kala partai politik juga dan telah digunakan untuk mempertahankan pengelompokan yang sudah mapan atau untuk menghancurkan *status quo* seperti yang terjadi pada Revolusi Bolshevik.

Pada pembabakan sejarah politik Indonesia, periode paling menggeliat apabila membicarakan tentang partai politik terjadi pada masa Demokrasi Terpimpin dimana pada tahun 1955 tepatnya pemerintah berhasil melaksanakan pemilu 1955 yang dinilai paling demokratis. Pada tahun 1955 pula dimulai lembaran baru dimana partai politik sudah difungsikan untuk memperoleh kekuasaan dan memperkuat pemerintahan. Setelah presiden Soeharto secara *de facto* diangkat menjadi pejabat Presiden pada tahun 1966 melalui keputusan presiden, secara tidak langsung konstelasi keadaan politik di Indonesia juga berangsur berubah. Ketika memasuki periode 1970-an, presiden Soeharto memberlakukan suatu kebijakan yang dinamakan destrukturisasi partai. Pada dasarnya destrukturisasi partai merupakan upaya untuk menyederhanakan partai politik yang jumlahnya bisa dikatakan banyak untuk kemudian dipolarisasikan menurut tiga ideologi besar yaitu Golongan Karya, Agama dan Nasionalisme Sekuler. Berkat kebijakan tersebut lahirlah PPP sebagai perwakilan dari kelompok beraliran agama, PDI mewakili kelompok beraliran nasionalisme sekuler dan Golkar mewakili golongan karya yang diproyeksikan sebagai kekuatan utama memperpanjang rezim Orde Baru bersama militer.

Sesudah kebijakan tersebut diberlakukan tepatnya pada 1973, sesudah PPP dan PDI dideklarasikan. Nampaknya alur perpolitikan Indonesia setelah itu seperti disetir oleh penguasa Orde Baru dan beberapa kekuatan-kekuatan yang mendukungnya. Kebijakan tersebut digunakan seperti pintu masuk untuk ke tahap yang selanjutnya dan berujung pada hegemoni Golkar. Setelah itu bentuk diskriminasi selalu dilakukan oleh Golkar dan para penguasa Orde Baru demi melenyapkan pengaruh dua kekuatan politik dalam diri PPP dan PDI ketika itu. Bentuk diskriminasi bermacam-macam bentuknya mulai melakukan propaganda hingga terciptanya konflik internal. Patut diperhatikan bahwa propaganda Orde Baru dalam melenyapkan pengaruh PPP dan PDI adalah memecah belah faksi di dalam partai. Contoh: seperti konflik faksi NU dan MI di PPP menjelang Pemilu 1982. Selain konflik internal yang dibuat, diskriminasi juga dilakukan dengan melakukan kebijakan-kebijakan yang tidak menguntungkan bagi PPP dan PDI semisal pemberlakuan asas tunggal Pancasila pada tahun 1982-1987 yang membuat PPP seolah-olah mati suri karena kehilangan asas perjuangan partai nya.

METODE

Penelitian sejarah tidak hanya sekedar menyajikan kisah masa lampau yang disertai dengan data-data yang lengkap dan terpercaya sehingga mendapatkan tulisan yang sistemik dan obyektif, tetapi juga berusaha untuk merekonstruksi kisah tersebut hingga membentuk cerita sesuai dengan kenyataan yang telah terjadi. Penelitian sejarah juga termasuk dalam penelitian ilmiah. Pada umumnya dalam penelitian ilmiah terdapat metode yang digunakan sebagai prosedur dalam melakukan penelitian, sama halnya dengan penelitian sejarah, juga memiliki metode dalam melakukan penelitian. Menurut Daliman metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Peristiwa masa lampau dapat kita hadirkan kembali dengan merekonstruksi peristiwa itu berdasarkan fakta-fakta yang kita peroleh dari

metode yang kita lakukan. Rekonstruksi sejarah pada hakekatnya sebagai upaya menyusun kembali kesatuan sejarah yang utuh dan koheren yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Menghadirkan kembali peristiwa masa lampau melalui tulisan yakni tulisan sejarah. Menurut Kuntowijoyo penelitian sejarah mempunyai lima tahap, yaitu: (1) pemilihan topik, (2) pengumpulan sumber, (3) verifikasi (kritik sejarah, keabsahan sumber), (4) interpretasi: analisis dan sintesis, dan (5) penulisan.

Heuristik merupakan tahapan pertama yang harus dilakukan dalam penelitian sejarah, namun sebelum itu hal pertama yang dilakukan dalam melakukan penelitian sejarah adalah melakukan pemilihan topik. Pemilihan topik pada penelitian ini atas dasar keinginan mengetahui bagaimana sejarah perjalanan PPP yang hingga sekarang masih bisa mempertahankan eksistensinya dan menjadi partai Islam tertua. Selain itu keinginan untuk mengetahui bagaimanakah dinamika yang dialami oleh PPP setelah Orde Baru karena sudah kita ketahui bersama bahwa konstelasi politik nasional sebelum era Reformasi selalu didominasi oleh Golkar. Perjalanan politik PPP yang selalu dirundung masalah sejak awal berdirinya menjadi suatu hal yang menarik untuk dijadikan topik penelitian karena di sana terdapat suatu proses dinamika yang berguna untuk proses pembelajaran bagi partai-partai baru apabila ingin membuat partai tersebut bisa bereksistensi hingga beberapa orde pemerintahan.

Studi pustaka merupakan langkah awal dalam melakukan penelitian, untuk memperoleh konsep, teori ataupun data awal yang diperlukan dalam penelitian. Konsep ataupun teori perancangan kota merupakan teori yang sangat penting dalam penelitian. Tahapan pengumpulan data yang dilakukan meliputi pengumpulan data pustaka berupa dokumen-dokumen yang dapat menunjang penelitian ini. Data-data yang dihasilkan dari dokumen tersebut berasal dari beberapa perpustakaan-perpustakaan tingkat daerah hingga pusat, selain itu dokumen juga diperoleh berkat hibah dari arsip yang dimiliki oleh PPP sendiri dan mantan tokoh-tokoh partai

yang memberikan beberapa dokumen kepada penulis. Setelah data-data tersebut terkumpul, maka penulis kemudian memilih dan menafsirkan agar bisa menjadi suatu fakta sejarah yang sudah diakui kredibilitasnya. Lalu data-data sejarah yang sudah relevan tersebut akhirnya dipilih kembali untuk ditampilkan secara deskriptif naratif melalui historiografi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah jatuhnya rezim Orde Baru pada tanggal 21 Mei 1998, otomatis keran Reformasi dibuka sebesar-besarnya. Pemerintahan yang hanya berusia 512 hari ini mengalami banyak peristiwa yang fundamental. Salah satunya adalah adanya ledakan partisipasi politik di awal era Reformasi. Kala itu dengan dibebaskannya seluruh masyarakat yang ingin mendirikan partai politik, maka ledakan partisipasi politik pun merupakan sesuatu yang lumrah. Dimana pada awal era Reformasi, banyak partai-partai baru yang didirikan termasuk partai politik yang mengatasnamakan Islam sebagai asas perjuangan partai. Tercatat ada 141 partai politik yang mendaftarkan diri ke Departemen Kehakiman dan 38 partai politik tersebut diantaranya menggunakan asas Islam.

Partai-partai baru ini perlu tempat untuk mengukur kekuatan masing-masing, alhasil pemilu 1999 yang merupakan ajang pertarungan politik partai-partai yang baru dibentuk ini. Untuk partai Islam saja kini PPP ditemani oleh beberapa partai Islam lain dalam diri PAN, PBB, PK dan lain-lain. Dengan kemajemukan yang terdapat dalam pemilu 1999 inilah pemilu ini lebih dikenal dengan nama pemilu multipartai. Banyaknya partai Islam yang bermunculan diyakini akan sangat mempengaruhi perolehan suara dan jumlah kursi yang diperoleh oleh PPP pada pemilu 1999 ini, selain jumlah kursi dan suara fenomena ini pun akan memecah belah kekuatan Islam yang tadinya hanya dicurahkan kepada PPP pada era Orde Baru. Untuk menghadapi fenomena tersebut maka PPP harus berhasil membedakan diri dengan partai-partai Islam yang baru dibentuk tadi, maka dari itu perlu beberapa strategi khusus agar PPP mampu

melaksanakan ujian dengan baik berupa Pemilu 1999 yang multipartai demi kelangsungan partai di masa yang akan datang.

Strategi yang digunakan oleh PPP dalam menghadapi pemilu 1999 yang *chaos* tersebut diantaranya adalah: *Pertama*, membentuk KR PPP (Komite Reformasi Partai Persatuan Pembangunan). Lembaga ini nanti terdapat keterkaitan dengan program reformasi PPP yang merupakan salah satu strategi PPP juga. *Kedua*, perubahan asas dan lambang partai menjadi Ka'bah dan Islam. Perubahan ini dinilai menjadi sangat fundamental karena sangat mempengaruhi perjuangan PPP, berdasarkan jejak pendapat Tempo bahwa pemilih Islam menjatuhkan pilihan kepada partai Islam dengan lebih mementingkan asas dan kemudian lambang. Perubahan ini merupakan langkah cerdas dalam membaca kondisi konstituen.

Ketiga, ini juga tak kalah penting dengan poin kedua yaitu keputusan menunjuk Hamzah Haz menjadi Ketua Umum partai berdasarkan keputusan Muktamar IV PPP pada tahun 1998, hal ini dinilai efektif karena melihat latarbelakang Hamzah Haz yang berasal dari NU yang kemudian dengan adanya keputusan ini bisa menarik kaum nahdliyyin untuk memilih PPP dibanding PKB. *Keempat*, setahun sebelum penyelenggaraan Pemilu 1999 pada bulan Juni diadakan Sidang Istimewa MPR yang menghasilkan ajimat reformasi. Diantaranya tersebut terdapat sumbangsih berupa enam poin PPP yang kemudian dimasukkan dalam ajimat reformasi, dari situlah kemudian PPP dicap sebagai partai reformis yang paling pertama. Lalu ketika penyelenggaraan Pemilu 1999 bahwa isu-isu tentang reformasi memang banyak dan diperbincangkan, dan dari perbincangan itu pula PPP terlihat berbeda dengan embel-embel partai reformis.

Kelima, poin terakhir ini merupakan transformasi pola pikir dimana pada saat itu partai-partai Islam lebih terlihat memfokuskan diri untuk mengalahkan partai sekuler dalam diri PDI, namun PPP terlihat berbeda manakala ia lebih menunjukkan sebuah pola pikir *we fight them* ketimbang *we fight us*. Kata *them* yang dimaksud bukan partai sekuler akan tetapi permasalahan

bangsa yang keliwat banyak dan pelik, sedangkan *us* adalah partai sekuler tadi.

Itulah beberapa strategi khusus PPP dalam menghadapi pemilu 1999 yang multipartai dan terdapat banyak saingan yang bermunculan, memang dalam pemilu tersebut PPP tidak keluar sebagai pemenang akan tetapi berdasarkan perolehan suara dan kursi di parlemen PPP masih tetap unggul dibandingkan dengan partai Islam yang lain. Artinya adalah PPP masih dipercaya konstituen sebagai pemegang mandat aspirasi dari kalangan Islam di Indonesia kala itu. Selama 40 tahun perjalanan PPP dalam menghiiasi kancah perpolitikan nasional, tentu pasti PPP sudah mengalami asam garam dalam dunia politik Indonesia. Partai yang merupakan hasil olahan Orde Baru ini memulai karir politiknya pada pemilu 1977, karena PPP baru saja muncul pada tahun 1973, tepatnya pada tanggal 5 Januari 1973. Dalam perjalanan politiknya, PPP telah beberapa kali mengalami perlakuan yang diskriminatif oleh pemerintah Orde Baru yang tidak menginginkan kekuatan Islam besar di Indonesia. Selain itu juga PPP terkenal sebagai partai percekcoakan karena seringnya terjadi perpecahan dan konflik internal dalam partai. Selama itu pula tercatat ada dua konflik internal yang sempat mengancam eksistensi PPP dalam berpolitik.

Konflik pertama terjadi pada masa kepemimpinan Jaelani Naro pada tahun 1982, awal mula konflik internal ini bersumber pada sikap diskriminatif Naro perihal nomor urut DCS pemilu 1982 yang menempatkan kader-kader NU di tempat yang tidak strategis. Alhasil karena tidak terima dengan perlakuan tersebut maka NU menyatakan diri keluar dari PPP melalui Muktamar Situbondo. Konflik internal ini terjadi antar unsur yaitu unsur NU dan unsur MI yang merupakan unsur pendukung terkuat PPP pada saat itu, sedangkan untuk konflik internal ini melibatkan antar elit partai yang berbeda pendapat. Bukan karena sikap diskriminatif penguasa.

Konflik internal yang kedua terjadi setelah berlangsungnya pemilu 1999, benih-benih konflik tersebut mulai muncul manakala keputusan Rapimnas menetapkan bahwa Muktamar V PPP

dilaksanakan pada tahun 2004 setelah pemilu. Keputusan itu mengecewakan Zainuddin MZ dan kelompoknya yang menilai melanggar konsitusi partai karena tidak sesuai dengan periodisasi kepemimpinan partai yang seharusnya mengalami siklus lima tahunan. Berangkat dari rasa kecewa akibat keputusan Rapimnas tersebut maka Zainuddin MZ dan kelompoknya berusaha melepaskan diri dari panji-panji partai berlambang Ka'bah itu dengan cara membuat partai tandingan bernama PBR. Zainuddin MZ dan kelompoknya mendeklarasikan PBR pada tanggal 20 Januari 2002 yang sebelumnya bernama PPP Reformasi, setelah deklarasi tersebut konflik internal antara PPP dan PBR kian meruncing.

Menggunakan teori perjuangan kelas milik Marx maka kita dapat membedah konflik internal ini dari perspektif tersebut. Fase pertama dari teori tersebut berawal dari transformasi struktural yang menghasilkan kelompok penguasa dan kelompok non penguasa. Dalam hal ini kelompok penguasa diwakilkan dengan para pimpinan partai termasuk ketua umum yaitu Hamzah Haz dan kelompok non penguasa dalam hal ini diwakilkan oleh Zainuddin MZ dan kelompoknya beserta para kader-kader muda yang ingin memulai karir politiknya. Kemudian fase selanjutnya adalah polarisasi dan kristalisasi secara internal dimana para pemimpin mengalami ketegangan antar pimpinan partai, dalam hal ini dimana Zainuddin MZ tidak setuju dengan keputusan Hamzah Haz perihal jadwal pelaksanaan Mukhtar V PPP yang bermuara dengan adanya perjuangan kelas. Untuk mencapai perjuangan kelas tersebut melalui beberapa tahap dimana yang pertama yaitu kontradiksi kelas yang ditunjukkan dengan adanya friksi antara Hamzah Haz dan Zainuddin MZ.

Setelah itu timbul antagonisme kelas yang diindikasikan dengan timbulnya rasa saling curiga dan kebencian antar kedua kelompok yang berkonflik ini, hal ini ditunjukkan dengan rasa saling benci manakala PBR dideklarasikan yang membuat konflik ini dapat dibawa ke penyelesaian melalui metode represif menurut Soerjono Soekanto. PPP memilih untuk

melakukan tindakan rekonsiliasi sebagai bagian dari penyelesaian konflik menggunakan metode represif. Upaya rekonsiliasi pun dilemparkan PPP melalui momen-momen krusial partai seperti menjelang pelaksanaan Mukhtar, Harlah ataupun momen yang mengundang animo massa secara masif. Namun upaya tersebut selalu ditolak oleh PBR dengan berbagai alasan, yang kemudian sampai pada akhir teori perjuangan kelas milik Marx yang mengatakan bahwa salah satu pihak yang berkonflik akan musnah dengan sendirinya. Hal ini bisa dibuktikan manakala PBR harus mundur dari kancah politik setelah pemilu 2009.

SIMPULAN

Ketika menghadapi pemilu 1999 yang multipartai tersebut, PPP berhasil mengguguli semua partai Islam bentukan awal Reformasi, namun hanya menempati urutan ketiga dalam perolehan suara. Akan tetapi dengan perolehan suara ini mengindikasikan bahwa PPP masih dipercaya untuk memegang mandat sebagai pemegang aspirasi konstituen Islam yang paling diprioritaskan. Untuk mencapai hal tersebut tentu tidak mudah, diperlukan strategi-strategi khusus agar semuanya bisa berjalan lancar sesuai yang dikehendaki. Adapun strategi khususnya diantaranya adalah perubahan asas dan lambang partai menjadi Ka'bah dan Islam, penunjukkan Hamzah Haz sebagai ketua umum partai dengan maksud untuk menarik kembali *kaum nahdliyyin*, stigma PPP sebagai partai reformis dan yang meletakkan pondasi untuk proses reformasi pada Sidang Istimewa MPR pada tahun 1998.

Setelah pelaksanaan pemilu 1999 dengan segala retorikanya, PPP dalam mempertahankan eksistensinya kembali terjatuh konflik internal dengan PBR. Konflik tersebut diakibatkan keputusan jadwal Mukhtar V PPP yang seharusnya 2003 tetapi diputuskan setahun berikutnya. Kelompok yang kecewa memilih mendirikan PBR. Hubungan PPP dan PBR semakin renggang dan tidak harmonis setelah itu. Tercermin antagonisme kelas yang sangat besar dari tingkat cabang hingga pusat antar partai tersebut. Dampak yang dihasilkan dari konflik

internal ini pun berbeda-beda, PPP tetap berhasil mempertahankan eksistensinya dan berhasil tetap eksis di kancah perpolitikan nasional hingga sekarang. Akan tetapi PBR harus rela gulung tikar lebih awal dan tereliminasi dari khazanah perpolitikan nasional seperti penyelesaian dari teori perjuangan kelas milik Marx.

bertempat di Kediaman Endin AJ Soefihara.

Wawancara dengan H.M. Dja'far Siddiq pada tanggal 14 Agustus 2015 pukul 18.37 bertempat di Kediaman H.M. Dja'far Siddiq.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Chaidar. 2000. *Pemilu 1999: Pertarungan Ideologis Partai-Partai Islam versus Partai-Partai Sekuler*. Jakarta: Darul Falah.
- Amir, Zainal Abidin. 2003. *Peta Politik Islam: Pasca Soeharto*. Jakarta: LP3ES.
- Aziz, Abdul. 2006. *Politik Islam Politik: Pergulatan Ideologis PPP Menjadi Partai Islam*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Basyaib, Hamid & Abidin, Hamid (penyunting). 1999. *Mengapa Partai Islam Kalah?* Jakarta: Alvabet.
- Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan. 2003. *PPP 30 Tahun Bersama Ummat*. Jakarta: DPP PPP.
- Gottschalk, Louis. 1973. *Mengerti Sejarah*. Terjemahan Nugroho Notosusanto. Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia.
- Haris, Syamsuddin. 1991. *PPP dan Politik Orde Baru*. Jakarta: Grasindo.
- Husin, Al- Banjari M. 1999. *Stembus Accord "Malaikat Penyelamat Partai Islam dalam Mengapa Partai Islam Kalah?"* Jakarta: Alvabet.
- Pranoto, SuhartonoW. 2010. *Teori dan Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Puspoyo, Widjanarko. 2012. *Dari Soekarno hingga Yudhoyono: Pemilu Indonesia 1955-2009*. Solo: Era Adicitra Intermedia.
- Soerjono Soekanto. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suprayitno. 1993. *Pemilu Indonesia Dari Masa Kemasa*. Jakarta: PT. Teguh Mandiri Pertiwi.
- Sztompka, Piotr. 2005. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenada.
- Wawancara dengan Endin AJ Soefihara pada tanggal 19 Juni 2015 pukul 21.37